

Pengaruh Kebijakan Fiskal dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah : Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan

Harry Yulvian¹, Rita Martini², Rosy Armaini³

^{1,2,3} Politeknik Negeri Sriwijaya, Jurusan Akuntansi

harry.tanjung@gmail.com

ABSTRACT

Research on the effect of fiscal policy and balancing funds on expenditures in the government of the City/Regency of South Sumatra is the purpose of this study. City/Regency Provincial Government Budget Realization Report. South Sumatra 2019-2021 is the main source of secondary data for this research. The saturated sample approach is the one used for the sampling process. Classical assumption test, multiple linear regression analysis test, and hypothesis testing are the analyzes used in this study. The tool used by the SPSS 26 application, and the results indicate that PAD, DBH, and DAU have a significant positive effect on regional spending, while DAK has no effect on City / District government spending. South Sumatra

Keywords: Regional Expenditure; Balance Fund; Fiscal Policy

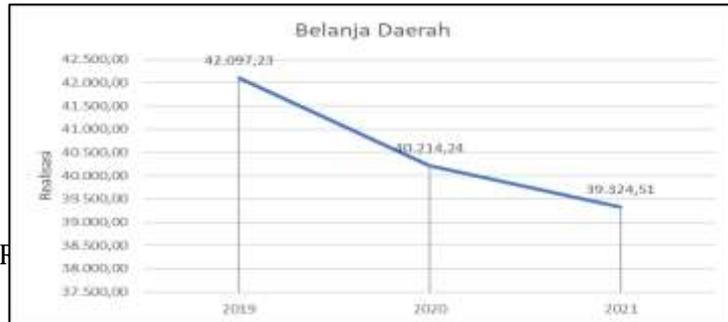
ABSTRAK

Penelitian tentang pengaruh kebijakan fiskal serta dana perimbangan terhadap pengeluaran pada pemerintahan Kota/Kab Sumsel menjadi tujuan dari penelitian ini. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota/Kab Prov. Sumsel 2019-2021 menjadi sumber utama data sekunder untuk penelitian ini. Pendekatan sampel jenuh adalah salah satu yang digunakan untuk proses pengambilan sampel. Uji asumsi klasik, uji analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis merupakan analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Alat yang digunakan aplikasi SPSS 26, dan hasilnya menandakan PAD, DBH, dan DAU berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah, sementara DAK tidak berpengaruh terhadap belanja pemerintah Kota/Kab Prov. Sumsel

Kata kunci: Belanja Daerah; Kebijakan Fiskal; Dana Perimbangan

PENDAHULUAN

Desentralisasi daerah merupakan landasan penyelenggaraan pemerintahan dan pengabdian kepada masyarakat. Suatu pemerintah daerah melakukan pengeluaran sebagai pelayanan publik untuk melaksanakan tugasnya atau biasa disebut dengan pengeluaran daerah. Pengeluaran teritorial digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah yang berada di bawah yurisdiksi provinsi, teritorial, atau kota, termasuk urusan wajib, sukarela, dan internal. Berdasarkan jumlah belanja Sumsel yang direalisasikan pada 2019-2021 pada **Gambar 1**. dapat disimpulkan bahwa realisasi belanja daerah terjadi penurunan pada setiap tahunnya.



Gambar 1. R

“Berdasarkan fenomena tersebut, pemerintah pusat meminta Pemda Sumsel untuk mempercepat realisasi belanja APBD dan APBN agar tidak menumpuk hingga akhir tahun (Wulandari, 2021).” Tujuan belanja daerah adalah untuk melakukan kegiatan pembangunan di daerah tersebut. Jika pemerintah pusat meningkatkan jumlah uang yang diberikannya kepada berbagai pemerintah daerah, maka akan ada hasil positif dalam hal pembangunan daerah. Kapasitas daerah untuk membelanjakan uang daerah dan memaksimalkan penggunaan dana untuk kegiatan masyarakat merupakan indikator yang jelas dari kinerja daerah dalam pengelolaan sumber daya keuangannya.

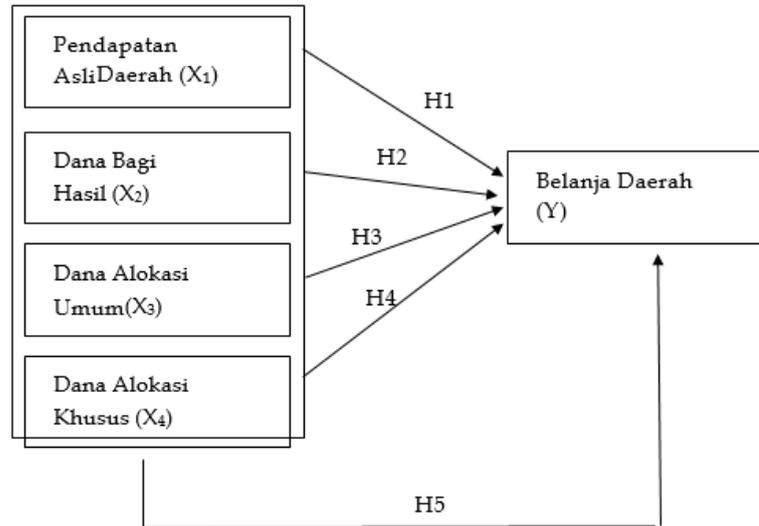
Salah satu daerah yang diminta pemerintah pusat untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah pemerintah Sumatera Selatan. Permintaan ini didasari oleh adanya pengaruh antara penggunaan dana di daerah dengan pelaporan dana di pusat. Pemerintah Sumsel terus berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan belanja daerah dapat didukung oleh komitmen pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dan mengalokasikan dana untuk kebijakan fiskal daerah, yang sangat penting sejak pelaksanaan otonomi daerah.

Selain dari pajak, pendapatan daerah bertambah karena adanya dana perimbangan. DP mencakup dana untuk DBH, DAU, dan DAK. Terdapat peran yang sangat penting dari DP ini dalam memenuhi belanja daerah. Untuk daerah, DAU dan DAK dirancang untuk mendukung kecukupan pembiayaan daerah. Masalah muncul ketika daerah membutuhkan DAU dan DAK yang lebih besar atau sesuai dengan kebutuhan pembiayaan daerah. Di sisi lain, pengalokasian DAU dan DAK berdasarkan kebutuhan daerah disebabkan tidak cukupnya dasar perhitungan kebutuhan fiskal (data terbatas, tidak ada standar pelayanan minimal per daerah). Berdasarkan informasi yang diberikan pada latar belakang, maka akan dilakukan studi yang mengkaji dampak kebijakan fiskal dan kebutuhan dana perimbangan terhadap pembelanjaan daerah yang dilakukan oleh pemerintahan daerah di tingkat Kota/Kab di Sumsel.

Hipotesis pertama dari kajian ini adalah:

- H₁ : Diduga ada pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah.
- H₂ : Diduga ada pengaruh DBH terhadap Belanja Daerah.
- H₃ : Diduga ada pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah.
- H₄ : Diduga ada pengaruh DAK terhadap Belanja Daerah.

H₅ : Diduga PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Daerah.



Gambar 2. Kerangka Berpikir

Sumber: Data diolah peneliti (2022)

METODE PENELITIAN

Penelitian kuantitatif bertujuan menentukan bagaimana variabel independen mempengaruhi hasil penelitian variabel dependen. Akan terdapat korelasi antara variabel independen yang meliputi PAD dan DP dengan variabel independen yaitu belanja daerah. Kajian dilakukan pada Pemerintah Kota/Kab di Sumsel yang bertanggung jawab atas pelaporan keberhasilan anggaran pendapatan serta belanja daerah kepada Direktorat Jenderal Keuangan Republik Indonesia. Dalam bentuk rangkaian data keuangan tahun 2019-2021, data yang diperoleh dari akses media online di web DJPK Kemenkeu dan BPK RI. Populasi yang digunakan berasal dari 17 Kota/Kab yang berbeda di Sumsel. Sampel jenuh adalah metode pengambilan sampel yang dipakai dalam penelitian. Jumlah interval tahun untuk 2019-2021 dan data total untuk 17 Kota/Kab. Di Sumsel. Penelitian ini menggunakan data sekunder, mengelola data yang terkait penelitian ini, kemudian menganalisis data uji normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan regresi linier berganda, serta uji koefisien determinasi, dan uji hipotesis. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik analisis.

Pada penelitian khusus ini, metode untuk menganalisis data dikenal sebagai analisa regresi linier berganda dan dilakukan dengan software yang dikenal sebagai SPSS (Statistical Program and Service Solution Version 26.0).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Statistik Deskriptif

Tabel 1 Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	51	27.846.959	1.158.871.192	185.230.532	242.213.870
DBH	51	105.066.659	2.405.793.796	405.485.934	488.354.319
DAU	51	291.076.821	1.347.785.960	612.783.816	253.480.781
DAK	51	83.028.516	448.611.797	215.190.765	101.712.446
Belanja Daerah	51	734.316.797	3.968.206.721	1.811.151.715	893.226.311
Valid N (listwise)	51				

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2022

Uji ini bermaksud memberikan gambaran pada data secara apa adanya. Uji statistik deskriptif menghasilkan hasil sebagai berikut:

1. Belanja Daerah Kota/Kab di Sumsel nilai terendah yang diterima Kota Pagar Alam pada tahun 2021 sebesar Rp734.316.797.197,67.
2. PAD di Kota/Kab Sumsel yang akan diperoleh Kabupaten Empat Lawang pada tahun 2021 minimal senilai Rp27.846.959.236,30.
3. Nilai minimal DBH Kabupaten/Kota di Sumsel adalah Rp 105.066.658.795 yang diterima Pagar Alam City pada tahun 2021.
4. Nilai minimal Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten/Kota Sumsel yang diperoleh Penungkal Abab Kabupaten Lematang Ilir sebesar Rp 291.076.821 triliun.
5. Dana untuk alokasi khusus di daerah Sumatera Selatan, nilai minimal yang diterima Kota Pagar Alam tahun 2019 sebesar Rp83.028.515.863.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

“(Ghozali, 2018) Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal”

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		51
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.0000790
	Std. Deviation	205.470.765.845
Most Extreme Differences	Absolute	.084
	Positive	.084
	Negative	-.064
Test Statistic		.084
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2022

Tabel 2 menunjukkan bahwa data terdistribusi normal karena tersebar di sepanjang diagonal sumbu Y, oleh karena itu dapat dikatakan data terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

“(Ghozali, 2018), Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).”

Tabel 3 Hasil Uji Multikorelitas

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics		
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF	
	B	Std. Error	Beta					
1	(Constant)	-167.287.854.083	118.741.046.644		-1.409	.166		
	PAD	.834	.197	.226	4.237	.000	.403	2.479
	DBH	1.245	.101	.681	12.383	.000	.380	2.628
	DAU	2.172	.359	.616	6.050	.000	.111	9.025
	DAK	-.057	.756	-.006	-.075	.941	.155	6.447

a. Dependent Variable: Belanja Daerah
 Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2022

Tabel 3. Semua tidak ada variabel yang menunjukkan tanda multikolinearitas karena Tolerance lebih dari 0,100 dan VIF kurang dari 10,00.

Uji Autokorelasi

“Uji autokorelasi (Ghozali, 2018) bertujuan apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya).”

Tabel 4 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.973 ^a	.947	.942	214.218.081.730	2.045

a. Predictors: (Constant), DAK, DBH, PAD, DAU

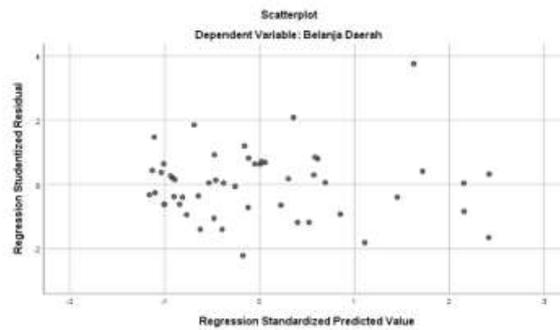
b. Dependent Variable: Belanja Daerah

Hasil uji Durbin-Watson menunjukkan bahwa tak ada autokorelasi.

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2022

Uji Heteroskedastisitas

“Uji heteroskedastisitas (Ghozali, 2018) bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.”



Gambar 3. Uji Heteroskedastisitas

Terlihat hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan titik-titik menyebar dan tidak membentuk pola jelas. Data juga berada di bawah angka 0 pada sumbu Y. Artinya tak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi, maka model regresi dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 5 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1						
	(Constant)	-167.287.854.083	118.741.046.643		-1.409	.166
	PAD	.834	.197	.226	4.237	.000
	DBH	1.245	.101	.681	12.383	.000
	DAU	2.172	.359	.616	6.050	.000
	DAK	-.057	.756	-.006	-.075	.941

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2022

rumus regresi:

$$\text{Belanja Daerah} = -167,287,854,083.302 + 0,834\text{PAD} + 1.245\text{DBH} + 2.172\text{DAU} - 0.57\text{DAK} + e$$

Koefisien Determinasi

Tabel 6 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.973 ^a	.947	.942	214.218.081.730

a. Predictors: (Constant), DAK, DBH, PAD, DAU

b. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2022

Terlihat hasil pengujian koefisien determinasi sebesar 0,942 atau setara dengan 94,2 % Hal ini menunjukkan di Kota/Kab di Sumsel, keempat variabel independen yang terdiri dari PAD, dan DP dapat menjelaskan 94,2% variabel Belanja Daerah. Sisa 5,8 persen dari total (100 persen dikurangi 94,2 persen = 5,8 persen) dapat diperhitungkan oleh faktor tambahan yang tidak diperhitungkan dalam penelitian ini.

Koefisien determinasinya adalah 0,942. Hal ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh terhadap Belanja Daerah sebesar 94,2 % sementara sisanya dipengaruhi variabel lainnya.

“Hasil penelitian ini selaras dengan (Ferdiansyah et al., 2018) yang menyatakan Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh dan signifikan terhadap Belanja Daerah, artinya Pemerintah Daerah yang memiliki PAD tinggi maka pengeluaran untuk Belanja Daerahnya juga semakin tinggi”

Pengaruh DBH Terhadap Belanja Daerah

Hasil penelitian ini membuktikan hipotesis kedua diterima. Selain itu, mengingat kekuatan korelasi di antara variabel dependen dengan variabel independen, bisa dilihat koefisien determinasinya adalah 94,2%. “Sehingga menunjukkan DBH berpengaruh terhadap Belanja Daerah sebesar 94,2% sementara variabel sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.”

“Hasil penelitian ini sejalan dengan (Mulyati & Yusriadi, 2018) bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah Artinya bila Dana Bagi Hasil meningkat Rp. 1 maka Belanja Daerah akan meningkat pula sebesar Rp. 0,904”. Namun berbeda dengan penelitian “(Lutpikah & Mahendra, 2020) bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif akan tetapi tidak signifikan terhadap belanja”. Kemudian hasil penelitian yang berbeda juga didapat dari “(Rasyid, 2018) bahwa Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah. hal ini dijelaskan bahwa dana bagi hasil tidak signifikan terhadap belanja ini terjadi karena adanya masalah keagenan. Dimana pihak eksekutif yaitu pemerintah daerah mengajukan anggaran untuk disetujui oleh pihak legislatif”

Pengaruh DAU Terhadap Belanja Daerah

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini DAU secara parsial berpengaruh terhadap variabel Belanja Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Selatan. Artinya hipotesis ketiga diterima. Lalu guna melihat berapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel dependen, bisa dilihat koefisien determinasinya adalah 94,2%. Hal ini menunjukkan bahwa DAU berpengaruh sebesar 94,2% terhadap Belanja Daerah. sementara sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya.

“Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian (Iqbal et al., 2020), (Mulyati & Yusriadi, 2018) dan (Lutpikah & Mahendra, 2020) bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja daerah. hal ini menunjukkan kenaikan DAU akan berdampak signifikan pada kenaikan Belanja Daerah dan DAU akan memberikan dampak pada peningkatan belanja (Rasyid, 2018).”

Pengaruh DAK Terhadap Belanja Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan variabel DAK secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah. artinya hipotesis keempat ditolak. Mengingat kekuatan korelasi diantara variabel terikat dengan variabel bebas bisa dilihat koefisien determinasinya adalah 94,2%. Sehingga menandakan DAK berpengaruh terhadap Belanja Daerah 94,2% di Kota/Kab di Sumsel. Sementara sisanya dipengaruhi oleh variabel yang lainnya.

“Penelitian ini juga selaras dengan (Ferdiansyah et al., 2018) bahwa DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, yang dipengaruhi oleh kecilnya DAK yang diterima oleh Pemerintah Daerah.” Hasil penelitian ini menunjukkan DAK digunakan Pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui pengeluaran-pengeluaran daerah.

Pengaruh PAD dan DP Terhadap Belanja Daerah

Hasil yang didapat dari penelitian ini ialah simultan PAD dan DP semuanya secara simultan mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Sehingga menandakan hipotesis keenam diterima. Selain itu, koefisien determinasi 0,482. Hal ini menandakan PAD, DBH, DAU, dan DAK, memiliki pengaruh 48,2 persen terhadap variabel Belanja Daerah Kota/Kab di Sumsel. sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

“Penelitian ini sejalan dengan (Rohana, 2021), (Rasyid, 2018) dan (Ferdiansyah et al., 2018) yang menyatakan variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus mempunyai pengaruh terhadap belanja daerah.”

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- A. Di Kota/Kab Prov. Sumsel. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah
- B. Di Kota/Kab Prov. Sumsel Dalam penelitian ini menyatakan bahwa DBH berpengaruh dan signifikan terhadap Belanja Daerah
- C. di Kota/Kab. Prov. Sumsel. Dalam penelitian menyatakan bahwa DAU secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap Belanja Daerah di Kota/Kab. Prov. Sumsel.
- D. di Kota/Kab. Prov. Sumsel. Dalam penelitian ini DAK secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap belanja daerah
- E. Di Kota/Kab. Prov. Dalam penelitian ini PAD, DBH, DAU, dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah Sumsel. Upaya peningkatan belanja daerah tak lepas dari peran Pemerintah dalam mengelola sumber pendapatan daerah yang dialokasikan untuk belanja yang mengutamakan kepentingan masyarakat dalam sektor kesehatan dan Pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- ferdiansyah, I., Risma Deviyanti, D., & Pattisahusiwa, S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah. *Inovasi*, 14(1), 44–52. <http://Journal.Feb.Unmul.Ac.Id/Index.Php/Inovasi>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Iqbal, M., Abbas, T., & Ratna. (2020). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Otonomi Khusus Terhadap* ferdiansyah, I., Risma Deviyanti, D., & Pattisahusiwa, S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah. *Inovasi*, 14(1), 44–52. [Http://Journal.Feb.Unmul.Ac.Id/Index.Php/Inovasi](http://Journal.Feb.Unmul.Ac.Id/Index.Php/Inovasi)
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Iqbal, M., Abbas, T., & Ratna. (2020). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh*. 03(3), 1–15. [Https://Ojs.Unimal.Ac.Id/Ekonomi_Regional/Article/View/3583](https://Ojs.Unimal.Ac.Id/Ekonomi_Regional/Article/View/3583)
- Lutpikah, N. W., & Mahendra, D. (2020). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak) Dan Dana Bagi Hasil (Dbh) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Karanganyar Tahun 2017-2019*. 5(2), 147–158. [Https://E-Journal.Stieaub.Ac.Id/Index.Php/Aktual](https://E-Journal.Stieaub.Ac.Id/Index.Php/Aktual)
- Mulyati, S., & Yusriadi. (2018). Dana Bagi Hasil Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Aceh. *Agregat*, 2(1), 55–66. [Https://Doi.Org/10.22236/Agregat](https://Doi.Org/10.22236/Agregat)
- Rasyid, M. (2018). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah. *Katalogis*, 6(5), 68–80.
- Rohana, S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 1(1), 39–49.
- Wulandari, D. (2021). *Pemprov Sumsel Diminta Tingkatkan Pad*. [Https://Sumatra.Bisnis.Com/Read/20210423/533/1385348/Pemprov-Sumsel-Diminta-Tingkatkan-pad](https://Sumatra.Bisnis.Com/Read/20210423/533/1385348/Pemprov-Sumsel-Diminta-Tingkatkan-pad)